



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PMK.011/2013

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkan daya saing industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika;
- b. bahwa terhadap impor barang dan bahan untuk industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan untuk industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2013;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama membuat komponen dan/atau produk elektronika.

42



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang, komponen dan subkomponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika oleh Perusahaan.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
- (3) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
 - a. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
 - d. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan di Tempat Penimbunan Berikat; atau
 - e. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran paling tinggi sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandaskan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
 - b. nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013;
 - c. nama Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. alamat;
 - f. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - g. uraian, jenis, dan spesifikasi teknis barang;
 - h. pos tarif (HS);
 - i. jumlah/satuan barang;
 - j. perkiraan harga impor;
 - k. negara asal;
 - l. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - m. nama dan tanda tangan dari pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

4/2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika oleh industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.011/" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.

40



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

- (1) Atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

4/8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 398

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Am
GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PMK.011/2013
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN
DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2013

DAFTAR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA
YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Polypropylene</i>	dalam bentuk butiran	3902.10.90.20
2.	<i>Polypropylene (PP) copolymer</i>	dalam bentuk butiran	3902.30.90.10
3.	<i>High Impact Polystyrene(HiPs)</i>	dalam bentuk butiran	3903.19.21.00
		dalam bentuk selain butiran	3903.19.91.00
4.	<i>ABS (Acrilonitril-butadiene- stirena)</i>	dalam bentuk butiran	3903.30.60.00
5.	<i>Polypropylene (PP) Sheet</i>	jenis Kopolimer dalam lembaran	3920.20.90.00
6.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) Sheet</i>	mengandung bahan plastisitas tidak kurang dari 6%	3920.43.00.00
		mengandung bahan plastisitas < 6%	3920.49.00.00
7.	<i>PVF/TPT/TPE Film</i>	0,2mm < tebal < 0,5mm, 500mm < lebar < 1010mm	3920.99.90.00
8.	<i>Ethylene Vinyl Acetate (EVA) sheet</i>	0,2mm < tebal < 0,6mm, 500mm < lebar < 1010mm	3921.90.20.00
9.	<i>Plastic Grille</i>	<i>Speaker Grille</i>	3926.90.59.00
10.	<i>Woven Fabric for Cloth Material of Spider</i>	Kain tenunan polos mengandung kapas $\geq 85\%$, tidak dikelantang dan berat $\leq 100\text{gr/m}^2$	5208.11.00.00
		Kain tenunan polos mengandung kapas $\geq 85\%$, tidak dikelantang dan berat $> 100\text{gr/m}^2$	5208.12.00.00
		Kain tenunan polos mengandung kapas $\geq 85\%$, dikelantang dan berat $\leq 100\text{gr/m}^2$	5208.21.00.00
		Kain tenunan polos mengandung kapas $\geq 85\%$, dikelantang dan berat $> 100\text{gr/m}^2$	5208.22.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Kain tenunan polos mengandung kapas $\geq 85\%$, tidak dikelantang dan berat $> 200 \text{ gr/m}^2$	5209.11.00.00
		Kain tenunan polos mengandung kapas $< 85\%$, tidak dikelantang dan berat $< 200 \text{ gr/m}^2$	5210.11.00.00
		Kain tenunan stapel sintetik poliester $\geq 85\%$, tidak dikelantang atau dikelantang	5512.11.00.00
		Kain tenunan serat stapel sintetik $\geq 85\%$, mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik 85% atau lebih menurut beratnya, tidak dikelantang atau dikelantang	5512.21.00.00
		Kain tenunan serat stapel sintetik $\geq 85\%$, mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik kurang dari 85%, tidak dikelantang atau dikelantang	5512.91.00.00
		Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 gr/m^2 , tidak dikelantang atau dikelantang, dari serat stapel poliester, tenunan polos	5513.11.00.00
		Kain tenunan polos dari serat stapel sintetik poliester $< 85\%$ dan berat $\leq 170 \text{ gr/m}^2$, tidak dikelantang atau dikelantang, kepar 3 benang atau 4 benang termasuk kepar silang	5513.12.00.00
		Kain tenunan polos lainnya dari serat stapel sintetik poliester $< 85\%$ dan berat $\leq 170 \text{ gr/m}^2$, tidak dikelantang atau dikelantang	5513.13.00.00

12



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 gr/m ² , dicelup, dari serat stapel poliester, tenunan polos	5513.21.00.00
		Kain tenunan polos dari serat stapel sintetik poliester <85% dan berat >170gr/m ² , tidak dikentang atau dikelantang	5514.11.00.00
		Kain tenunan polos dari serat stapel sintetik poliester <85% dan berat >170gr/m ² , tidak dikentang atau dikelantang, kepar 3 benang atau 4 benang termasuk kepar silang	5514.12.00.00
		Kain tenunan polos lainnya dari serat stapel sintetik <85% dan berat >170gr/m ² , tidak dikentang atau dikelantang	5514.19.00.00
		Kain tenunan polos dari serat stapel sintetik poliester <85% dan berat >170gr/m ² , dicelup, kepar 3 benang atau 4 benang termasuk kepar silang	5514.22.00.00
		Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik	5515.99.90.00
11.	<i>Cloth Material For Edge Cone</i>	Kain tenunan polos mengandung kapas <85% , dicelup dan berat ≤200gr/m ²	5210.31.00.00
12.	<i>Cloth And Coated Cloth Material For Edge cone</i>	Kain tekstil dilaminasi/dilapisi/ditutupi dengan poliuretan	5903.20.00.00
		Kain tekstil dilaminasi/dilapisi/ditutupi dengan bahan selain poliuretan/PVC	5903.90.00.90
13.	<i>Speaker Cloth</i>	Kain rajutan atau kaitan lainnya, dari wol atau bulu hewan halus	6006.10.00.00

4 R



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
14.	<i>Bitumen</i>	<i>Bitumen for Speaker</i> dalam bentuk lembaran	6807.90.90.00
15.	<i>Low Iron Tempered Glass</i>	-----	7007.19.90.00
16.	<i>Hot Rolled Steel Sheet In Coil</i>	4.75mm ≤ tebal ≤ 10mm, lebar ≥ 600mm	7208.37.00.00
		3mm ≤ tebal < 4.75mm, lebar ≥ 600mm	7208.38.00.00
		Tebal < 3mm, lebar ≥ 600mm	7208.39.00.00
17.	<i>Cold Rolled Steel Sheet In Coil</i>	1.0mm < tebal < 3mm, 600mm ≤ lebar ≤ 1250mm	7209.16.00.10
		0.5mm ≤ tebal ≤ 1.0mm, 600mm ≤ lebar ≤ 1250mm	7209.17.00.10
		0.17mm ≤ tebal < 0.5mm, 600mm ≤ lebar ≤ 1250mm	7209.18.99.00
18.	<i>Galvanized Steel Sheet in Coil</i>	Tebal tidak melebihi 1.2mm	7210.49.12.00
		Tebal melebihi 1.2mm	7210.49.13.00
19.	<i>PCM (Pre-coated Color Metal), VCM (Vinyl Coated Metal)</i>	Tebal ≤ 1,50 mm, lebar ≥ 600mm	7210.70.10.00
		0,15mm < tebal ≤ 0,5mm, lebar < 600mm	7212.40.90.00
20.	<i>Metal Mesh Material</i>	tidak dilapisi atau tidak disepuh	7314.49.00.00
21.	<i>Screw</i>	Sekrup dan baut lainnya, dengan mur atau cincin pipih maupun tidak	7318.15.00.00
22.	<i>Nut</i>	dari bahan baja	7318.16.00.00
23.	<i>Tinned Copper Foil</i>	0,003mm < tebal < 0,007mm, 0,05mm < lebar < 0,25mm	7410.12.00.00
24.	<i>Motor AC</i>	<i>Single phase, daya output ≤ 1kW</i>	8501.40.11.00
25.	<i>Transformator</i>	melebihi 30.000 kVA	8504.23.29.00
26.	<i>Electric Heating Resistors</i>	untuk peralatan rumah tangga	8516.80.30.00
27.	<i>Single Board MP3 Module</i>	<i>MP3 Player module without radio receiver</i>	8519.81.99.00
		<i>MP3 Player module with radio receiver</i>	8527.13.90.00
28.	<i>Junction Box</i>	untuk Panel Modul 30WP s/d 225WP	8536.90.29.00

4/12



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
29.	Lamp	Lampu khusus untuk produk <i>refrigerator</i>	8539.29.90.00
30.	Copper Wire	Kawat gulung dari tembaga dilak/dienamel dengan ukuran $0,07\text{mm} \leq \text{diameter} \leq 0,6\text{mm}$	8544.11.10.00
31.	Wire Roll	Kabel roll	8544.49.39.00
32.	Mesin penggerak wessel (<i>point machine</i> atau <i>point lock</i> dan <i>slide detector</i>)	Tegangan AC atau DC baik 1 atau 3 <i>phase</i> , tipe :110 V, 380 V	8608.00.20.00
33.	Penghitung gandar kereta api (<i>axle counter</i>)	Tegangan DC, 24VDC<V< 72VDC	8608.00.20.00
34.	Track circuit perlengkapan elektromekanis	Modul elektromekanis utama yang merupakan bagian dari <i>train detection system</i> , untuk sistem persinyalan kereta api, terdiri dari <i>insulation rail joint</i> , <i>trafo</i> dan <i>relay</i> , <i>connecting housing</i> AC 50 Hz <i>track circuit</i>	8608.00.20.00
35.	Timer	-----	9106.90.90.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO